



GEJOLAK INDO-PASIFIK: ANALISIS KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM MERESPON ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Arfa Bahrul Ulum, Reni Windiani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Australia conducts defense cooperation with Japan within the framework of the Reciprocal Access Agreement (RAA). The signing of this cooperation was carried out online on January 6, 2022. The signing of this defense cooperation is the second in a period of 6 months after previously Australia did it with the United States and Britain. Meanwhile in the Indo-Pacific, China continues to exert influence in the region and carries out several threatening activities. This research will try to explain the phenomenon between Australia and Japan and its relationship with China. This research will use the formulation of the problem "Why does Australia carry out defense cooperation with Japan through a Reciprocal Access Agreement?". The research method used in this study is a qualitative research method and uses the balance of threat theory. The findings in this study are that Australia is conducting defense cooperation with Japan through the RAA because there are threats made by China against Australia so that Australia is carrying out this cooperation as a form of response to increase strength over the threats that are present. As for suggestions for further research to develop it by discussing further about the implementation of this RAA cooperation.

Keywords: *Australia, Japan, RAA, China, Balance of Threat*

PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik dewasa ini tengah menjadi pusat perhatian dunia terkait dengan banyaknya fenomena permasalahan dan konflik di dalamnya. Indo-Pasifik sendiri merupakan kawasan yang letaknya berada pada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan ini menjadi sarat akan banyak kepentingan karena berisikan negara-negara besar yang mempunyai peran signifikan dalam dunia internasional seperti Australia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. (Haruko, 2020) Beberapa fenomena yang menjadi sorotan di Indo-Pasifik ini dilakukan oleh Tiongkok sebagai kekuatan utama di Indo-Pasifik yang juga sedang bertindak agresif yang dapat merugikan negara lainnya. Beberapa fenomenanya antara lain gejolak di Laut Tiongkok Selatan (LTS), perkembangan militer, dan ekspansi militer berupa rencana pembangunan pangkalan militer di luar teritorial Tiongkok. Fenomena pertama yakni gejolak di LTS di perlihatkan Tiongkok sebagai bentuk pembelaan mereka atas klaim "Nine Dash Line" atau sembilan garis putus-putus. Sembilan garis putus-putus ini menjadi klaim Tiongkok sebagai landasan teritorial atas dasar historis dan hal ini menjadi masalah karena bertentangan dengan UNCLOS 1982. Kejadian ini mengakibatkan pertentangan dan sengketa dengan negara lain seperti Filipina. Tiongkok merespon hal tersebut dengan bertindak agresif di LTS seperti

melakukan patroli di perairan sekitar Kepulauan Sparty, melakukan latihan militer secara masif, dan membangun beberapa fasilitas militer. (Council on Foreign Relations, 2020) Agresivitas lainnya adalah dari perkembangan militer, Tiongkok dikabarkan memiliki rudal yang bisa menjangkau Australia atau rudal *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) dengan jangkauan radius sejauh 15,000 km. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi negara-negara di sekitarnya untuk lebih waspada karena dampak dari senjata ini sangat membahayakan. (Shugart, 2021) Fenomena agresif terakhir adalah rencana pembangunan pangkalan militer di luar teritorial Tiongkok. Departemen Pertahanan Amerika Serikat sedang menyelidiki dugaan Tiongkok melakukan serangkaian pembangunan pangkalan militer di seluruh dunia. Hasilnya adalah pejabat Pentagon mengklaim bahwa Beijing sangat mungkin sudah mempertimbangkan dan merencanakan pangkalan militer tambahan dan fasilitas untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara dan darat. Dan secara sembunyi-sembunyi, mungkin Tiongkok telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara. Beberapa negara yang dicurigai yakni Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Kepulauan Solomon. (The Economic Times, 2021) Selain itu, Tiongkok pada tahun 2018 dikabarkan menjalin kerjasama dengan Vanuatu, sebuah negara yang letaknya kurang lebih 2,000 km dari pesisir timur Australia. Namun hal itu kemudian di bantah oleh Tiongkok dan tidak ada perjanjian apapun menyangkut pangkalan militer. (Smee & McGarry, 2018)

Selain Tiongkok terdapat pula negara lain yang melakukan manuver politik dan mengisik intrik yang ada di Indo-Pasifik yakni Australia. Australia melakukan manuver politik internasional dengan melakukan kerjasama pakta pertahanan dengan negara-negara yang kuat secara militer seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Tak kurang dari enam bulan, Australia sudah menandatangani dua kesepakatan yakni dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam kerangka AUKUS (Australia, United Kingdom, and United States) dan dengan Jepang dalam kerangka RAA (Reciprocal Access Agreement). AUKUS ditandatangani pada September 2021 menjadikan ini sebagai isu yang sangat panas dalam dunia internasional karena berhasil menuai banyak reaksi dari para pemerhati. Empat bulan berselang, Australia melakukan penandatanganan kesepakatan lainnya yakni RAA dengan Jepang pada Januari 2022.

Tentunya dua manuver yang dilakukan oleh Australia ini menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti. Australia memang tidak secara terang-terangan terancam akan Tiongkok namun terdapat beberapa asumsi yang bisa dikatakan bahwa Australia merasa terancam atas agresivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yakni dalam hal perkembangan militer Tiongkok yang sangat maju dan rencana pembangunan pangkalan militer. Tiongkok disebutkan memiliki rudal yang dapat menjangkau 15,000 km jauhnya dari daratan Tiongkok dan jarak terdekat antara Tiongkok ke Australia hanya kurang lebih 4,000 km. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi keamanan Australia jika saja Tiongkok berani meledakan rudalnya. Lalu ada rencana pembangunan pangkalan militer, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, negara yang sangat dekat dengan Australia, dikabarkan menjadi tujuan dari pembangunan pangkalan militer. Nama terakhir memang sudah ditolak oleh Tiongkok bahwa mereka tidak akan melakukannya di Vanuatu. Namun dengan adanya rencana tersebut bukan tidak mungkin akan ada pangkalan militer di Pasifik Selatan di masa yang akan datang.

Dari dua fenomena tersebut, penulis melihat ada keterkaitan satu sama lain antara agresivitas Tiongkok dan kerjasama pertahanan Australia Jepang. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa agresivitas Tiongkok mengakibatkan Australia bekerjasama dengan Jepang dalam kerangka RAA.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori *balance of threat* (BoT) yang dicetuskan oleh Stephen M. Walt. Teori BoT pada dasarnya merupakan teori yang digunakan untuk memahami relasi kausalitas mengenai persepsi ancaman yang berpotensi akan datang oleh suatu negara dan

respon negara tersebut melalui pembentukan aliansi untuk mengimbangi ancaman. Suatu negara akan dianggap mampu melawan atau memberikan ancaman bagi negara lain ketika negara tersebut *actual power*-nya memiliki variabel-variabel yang memenuhi indikator sebuah sumber ancaman (*source of threat*). Variabel-variabel yang dapat menjelaskan sumber ancaman ini yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention* (Walt, 1987). Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui penjabaran berikut.

Tabel 1. 1 Penjelasan Variabel atau Elemen Sumber Ancaman

No	Variabel/Elemen	Penjelasan
1.	<i>Aggregate Power</i>	Menjelaskan mengenai kekuatan relatif yang dimiliki suatu negara yang memungkinkan untuk menjadi pengancam. Kekuatan ini dapat diukur dari sumber daya yang dimiliki negara tersebut seperti ekonomi, populasi, kapabilitas industri militer, dan kemajuan teknologi.
2.	<i>Geographic Proximity</i>	Menjelaskan mengenai letak geografis dimana jarak menentukan suatu negara ketika memproyeksikan serangannya.
3.	<i>Offensive Power</i>	Menjelaskan mengenai kemampuan suatu negara untuk melakukan agresivitas pada negara lain dengan diukur pada aspek militer.
4.	<i>Aggressive Intention</i>	Menjelaskan mengenai tindakan agresif atau ekspansionis negara dapat memicu negara lain melakukan perlawanan kepada negara tersebut.

Elemen-elemen tersebut dapat menjadi sumber ancaman bagi negara lain jika telah memenuhi kriteria dengan ukuran bahwa semakin besar kepemilikan sumber daya atau pemenuhan satu elemen tersebut maka akan semakin mengancam bagi negara lain. Semisal pada *geographic proximity*, suatu negara akan menjadi ancaman jika jaraknya semakin dekat dengan sumber ancaman. Jika suatu negara telah memenuhi semua kriteria dari empat elemen tersebut maka negara tersebut sudah dikatakan mengancam. Suatu negara jika sesuai dengan indikator yang telah diuraikan dan mendapati hasil yang memenuhi kriteria maka negara tersebut bisa dikatakan mengancam. Walt (1987) kemudian memaparkan bahwa langkah selanjutnya jika sumber ancaman sudah teridentifikasi maka negara lain yang melihatnya sebagai ancaman akan merespon dengan aliansi. Aliansi, menurut Walt (1987), merupakan kesepakatan antara dua negara atau lebih yang bekerjasama dalam persoalan keamanan baik itu secara formal maupun non-formal. Walt (1987) pun mengelompokkan ada dua jenis kategori aliansi yang dilakukan oleh negara yakni *balancing* dan *bandwagoning*.

Balancing merupakan sebuah langkah perimbangan yang dilakukan oleh suatu negara ketika negara tersebut merasa terancam oleh negara lain. Sedangkan *Bandwagoning* merupakan suatu upaya aliansi yang dilakukan oleh suatu negara ketika mendapati ancaman dengan cara bergabung atau beraliansi dengan negara yang menjadi sumber ancaman tersebut. Secara umum, aliansi baik *balancing* atau *bandwagoning* bisa terbentuk oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

Tabel 1. 2 Faktor yang melatarbelakangi melakukan aliansi dengan memilih *bandwagoning* atau *balancing*

No	Faktor	Penjelasan
1.	<i>Distribution of power</i>	Faktor yang mempengaruhi ketika konflik pecah karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi karena adanya kesenjangan kekuasaan ataupun persamaan kekuasaan antar negara.
2.	Common Ideology	Faktor ini dipengaruhi oleh kesamaan ideologi
3.	<i>Political Intention</i>	Faktor ini dipengaruhi oleh adanya kepentingan suatu negara terhadap terbentuknya aliansi seperti memasukan nilai-nilai politiknya ke negara yang diajak untuk beraliansi
4.	<i>Strong vs weak states</i>	Faktor ini menyebutkan bahwa negara yang lemah akan lebih memilih untuk <i>bandwagoning</i> karena negara lemah hanya akan memberikan dampak yang kecil terhadap mereka yang merasa terancam sehingga caranya hanya dengan memilih pihak pemenang sebagai aliansi.
5.	<i>Availability of allies</i>	Faktor ini didasarkan pada ketidakterediaan pihak untuk berkoalisi, negara yang memiliki <i>power</i> cenderung untuk memaksimalkan sumber daya miliknya dan memilih <i>balancing</i> dan negara yang minim <i>power</i> akan melakukan <i>bandwagoning</i> karena ketiadaan pihak lain yang diajak berkoalisi dan pilihannya hanya ada pada sumber ancumannya (negara).
6.	<i>Peace and war</i>	Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi pada suatu negara yang memilih melakukan aliansi ketika masa damai dan awal peperangan akan dimulai. Negara akan memilih <i>balancing</i> pada masa awal perang atau damai sedangkan akan memilih <i>bandwagoning</i> ketika sedang dalam perang untuk menghindari kehancuran total

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe kualitatif, yakni dengan melakukan analisis untuk mencari tahu latar belakang Australia melakukan kerjasama pertahanan dengan Jepang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan melalui studi literatur yang bersumber pada penelaahan dokumen dari buku, artikel jurnal, makalah, laporan, pernyataan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan sumber penelitian. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif.

PEMBAHASAN

Merenggangnya Hubungan Australia-Tiongkok

Tiongkok saat ini merupakan negara yang mempunyai pengaruh di tatanan politik global dan dianggap sebagai negara rising power di kawasan. Tiongkok telah menjadi negara dengan perekonomian yang sangat maju dan bersanding dengan negara *major power* lainnya. (Alfian, 2020) Australia dan Tiongkok merupakan negara yang bekerjasama dengan baik dalam hal perekonomian. Bahkan Australia tercatat sangat bergantung akan pasar Tiongkok selama dua dekade terakhir sebagai contohnya pada tahun 2015 Tiongkok menyumbang 36,7 persen pasar ekspor Australia dengan nilai perdagangan mencapai \$ 100 miliar dollar Australia. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai rekanan perdagangan utama untuk ekspor Australia. Namun, hubungan dagang yang baik ini menemui penurunan dalam tujuh tahun terakhir. Terdapat beberapa peristiwa sejak tahun 2016 sampai 2021 yang menjadi faktor perenggang hubungan kedua negara. Awal mula kerenggangan terjadi pada 2016 dengan adanya tiga peristiwa yakni penerbitan buku putih pertahanan Australia yang terdapat bahasan tentang Tiongkok yang menjadi tantangan di Indo-Pasifik dan perlu diwaspadai, lalu ada tuntutan dari Australia kepada Tiongkok untuk menerima arbitrase LTS yang menolak kedaulatan Tiongkok, dan terakhir ada kebijakan Australia yang menghentikan penjualan perusahaan listrik public ke perusahaan milik Pemerintah Tiongkok.

Pada tahun 2017, Seorang anggota partai oposisi diduga menerima dana dari pengusaha Tiongkok untuk membuat komentar dukungan bagi Tiongkok terkait dengan masalah di LTS. Australia pun menganggap hal ini sebagai bagian dari intervensi asing dan tidak menghargai kedaulatan Australia. Masih di tahun yang sama, Keputusan Australia menerbitkan buku putih kebijakan luar negeri tahun 2017 pun mengakibatkan eskalasi hubungan dua negara tersebut memburuk karena buku putih tersebut membahas mengenai peninjauan kerangka diplomasi atas dasar perubahan kondisi internasional dan menekankan kekhawatiran akan kebangkitan Tiongkok. Akibat dari kebijakan tersebut, Tiongkok merevisi hubungannya dengan Australia. (Okano, 2021)

Pada tahun 2018, Australia memutuskan untuk memblokir Huawei dari infrastruktur 5G mereka karena alasan keamanan nasional. Konflik mencapai titik puncak ketika COVID-19 melanda dunia yang asalnya dari Tiongkok. Australia pun meminta kepada Tiongkok untuk melakukan penyelidikan independen tentang asal usul COVID-19. Namun Tiongkok merasa Australia sudah keterlalu dan menentang tindakan ini. Australia aktif mengancam dan seakan-akan menuduh Tiongkok atas kejadian ini dan hal ini membuat Tiongkok marah padahal Tiongkok telah membantah melakukan kesalahan yang berujung pandemi. Akibat dari peristiwa ini Tiongkok melakukan sanksi dengan menerapkan aturan dan bea masuk atas barang-barang dari Australia yang mencakup batu bara, bijih besi, daging sapi, barley, anggur dan kayu. (Okano, 2021)

Tiongkok sebagai ancaman bagi Australia

Tiongkok menjadi masalah utama di Indo-Pasifik dengan peranannya sebagai negara yang bersitegang dengan negara lain terkait dengan sengketa LTS. Tiongkok diklaim tengah melakukan invasi ke negara-negara seperti Filipina di wilayah yang masih menjadi sengketa dengan banyak melakukan aktivitas militer. Meskipun jarak Australia dan Tiongkok terpaut 7000-an kilometer, namun Australia merasa terancam akan Tiongkok yang bertindak agresif dan kepemilikan senjata nuklir yang dapat menjangkau Australia. Ketakutan ini tidak lepas dari hubungan buruk Australia sehingga Australia perlu waspada di tengah memburuknya hubungan. Untuk mengidentifikasi apakah Tiongkok merupakan ancaman bagi Australia atau bukan perlu digunakannya komponen yang terdapat dalam teori BoT melalui analisis sumber

ancaman dengan empat elemen yakni *aggregate power*, *geographical proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Tiongkok bisa dikatakan mengancam jika empat elemen tersebut terpenuhi.

(1) *Aggregate Power*

Aggregate power suatu negara dapat diukur berdasarkan indikator sumber daya tertentu seperti populasi, kekuatan ekonomi, kapabilitas industri militer, dan keunggulan teknologi. Penulis menggunakan sumber data dari situs MacroTrend, SIPRI, dan Biro Statistik Australia dan Tiongkok untuk mengukur kemampuan Tiongkok dan Australia. Indikator pertama yang menjadi ukuran yakni populasi. Tiongkok memiliki populasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Australia hal ini didasari pada tahun 2021 dimana Tiongkok memiliki 1.42 miliar penduduk sedangkan Australia hanya 26 juta penduduk. Indikator selanjutnya yakni kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi dapat didasari dengan melihat pada perolehan GDP masing-masing negara. Tiongkok memiliki GDP yang jauh lebih banyak dibanding Australia hal ini berdasarkan pada data tahun 2021 dimana Tiongkok memiliki GDP sebesar 17,73 triliun dollar sedangkan Australia hanya memiliki 1,5 triliun dollar. Perbedaan ini sangatlah jauh dan besaran GDP pun akan berpengaruh pada alokasi militer dan teknologi yang merupakan indikator selanjutnya karena semakin besar GDP suatu negara maka akan semakin besar juga nilai untuk alokasi anggaran lainnya. Pada Indikator kapabilitas industri militer, parameter yang akan digunakan adalah *military expenditure* atau anggaran belanja militer. Dari data tahun 2021, Tiongkok memiliki *military expenditure* yang besar yakni 293 miliar dollar sedangkan Australia hanya 31 miliar dollar. Perbedaan tersebut sangatlah jauh dan ini akan berpengaruh juga pada kemampuan militer suatu negara. Dengan jumlah tersebut, Tiongkok menempati peringkat dua sebagai negara terbesar dalam *military expenditure*. Indikator yang terakhir yaitu keunggulan teknologi. Untuk mengukur keunggulan teknologi, parameter yang digunakan adalah *research and development (RnD)* suatu negara. Dari data tahun 2021, Tiongkok mengeluarkan anggaran sebesar 436 miliar dollar untuk RnD sedangkan Australia hanya 31 miliar dollar. Perbedaan tersebut sangat telak dan Tiongkok unggul jauh dari segi RnD yang dapat berakibat pada kemampuan mengembangkan teknologi suatu negara karena jumlah dana untuk risetnya sangat besar. Dari keseluruhan data yang dihadirkan, Tiongkok unggul jauh dari Australia terhadap empat indikator tersebut sehingga Tiongkok bisa disimpulkan memenuhi aspek elemen *aggregate power* sebagai indikator sumber ancaman yang pertama.

(2) *Geographic Proximity*

Geographic proximity merupakan indikator sumber ancaman yang menekankan pada kedekatan geografis. Pendapat dari indikator ini adalah semakin dekat suatu negara dengan sumber ancaman maka akan semakin besar pula potensi ancaman yang didapat. Secara geografis, Australia dan Tiongkok dipisahkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Menurut laman Geodatos, jarak antar titik tengah kedua negara sejauh 7.448 km sedangkan jarak terdekat yang dihitung dari perbatasan negara dengan negara lain berjarak sejauh 4.004 km dan jarak terdekat kedua negara berdasarkan jarak antara kota besar dari Shanghai, Tiongkok ke Cairns, Australia mencapai 5,928 km. Dengan jarak seperti itu secara geografis tidak bisa dikatakan dengan ancaman yang nyata. Namun menurut Australia Defence Magazine (ADM) yang bisa mengakibatkan ancaman adalah karena letak populasi kedua negara terpusat di pesisir timur. ADM berpendapat bahwa Tiongkok relatif mudah menyerang daratan Australia karena letak populasi Australia sebanyak 90 persen berada di sepanjang wilayah pesisir timur. Dengan kemajuan teknologi dan militer bukan tidak mungkin Tiongkok dapat menjangkau

Australia melalui Samudera Pasifik yang menjadi penghubung kedua negara. (Muraviev, 2021)

Dari pemaparan di atas, *geographic proximity* antara Australia dengan Tiongkok tidak bisa dijadikan sebagai potensi ancaman bagi Australia karena jaraknya yang terlalu jauh. Namun hal ini bisa diatasi jika memang Tiongkok ada keinginan, seperti yang dijelaskan, ADM menyerang dan mengancam Australia ke daratannya dengan nekat melalui jalur laut atau udara karena memang pusat daripada Australia itu terdapat di sepanjang pesisir timur sehingga memungkinkan bila menyerang dan menginvasi Australia.

(3) *Offensive Power*

Offensive power atau kekuatan yang ofensif merupakan sumber daya strategis yang dimiliki suatu negara yang dipergunakan untuk mengancam kedaulatan negara lain atau teritorial negara lain dengan kemampuan yang dapat merusak dan menghancurkan dalam kata lain yakni sumber daya militer. Terdapat dua parameter yang menjadi ukuran yakni *manpower* dan alutsista. Dalam hal perbandingan Tiongkok dan Australia soal *manpower*, Tiongkok memiliki *manpower* yang jumlahnya sangat besar yakni 3.1 juta personel termasuk didalamnya personil aktif, personil cadangan, dan paramiliter sedangkan Australia hanya memiliki 79 ribu personil. Perbedaan *manpower* antara Tiongkok dan Australia sangatlah jauh, dan perbedaan ini pun masih sama dengan perbandingan alutsista yang dimiliki kedua negara. Alutsista ini dibagi ke dalam tiga matra yakni darat, laut, dan udara. Dari segi matra darat, Tiongkok memiliki total persenjataan sebanyak 4,9 ribu aset sedangkan Australia 1,8 ribu. Dari segi matra laut, Tiongkok memiliki total aset sebanyak 777 aset sedangkan Australia hanya ada 3 aset. Dan yang terakhir matra laut, Tiongkok memiliki 3,2 ribu aset sedangkan Australia hanya 430 aset. Dari 3 matra tersebut Tiongkok sudah jelas unggul jauh dari Australia mengenai kepemilikan Alutsista.

Terdapat pula tambahan parameter yakni kepemilikan senjata strategis seperti nuklir dan teknologi misil sebagai penguatan. Tiongkok tercatat memiliki senjata nuklir sebanyak 350 buah dan bahkan akan bertambah pada tahun 2027 sebanyak 700 buah. (Arms Control Association, 2022) Australia sampai saat ini masih belum memiliki senjata nuklir sehingga Tiongkok masih unggul jauh atas Australia. Mengenai kepemilikan rudal atau misil, Tiongkok memiliki 16 rudal dengan spesifikasi yang paling tinggi yakni rudal lintas benua atau *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* DF-41 yang bisa menjangkau sasaran sejauh 15 ribu km sedangkan Australia hanya memiliki 3 buah saja dengan jangkauan yang paling jauh hanya 166 km saja. Rudal yang dimiliki oleh Tiongkok ini menjadi suatu keunggulan yang mutlak atas Australia karena Tiongkok dapat menjangkau Australia dari daratan Tiongkok dengan rudal ICBM dan Australia patut betul-betul waspada akan hal ini dan ini menjadi alasan lain meskipun Australia dan Tiongkok terpaut jarak yang jauh. (Shugart, 2021)

(4) *Aggressive intention*

Aggressive intention merupakan sebuah perilaku suatu negara yang cenderung bertindak agresif atau menyerang terhadap negara lain. Elemen ini dapat diidentifikasi dengan melihat kepada perilaku atau tindakan yang sifatnya agresif kepada negara lain atau mendekati negara lain. Dalam kasus Tiongkok dan Australia ini, terdapat tiga peristiwa yang merupakan aktivitas militer agresif yakni kenaikan pengeluaran militer, agresivitas Tiongkok di LTS, strategi militer Tiongkok yang ingin membangun pangkalan militer di Pasifik. Yang pertama yakni kenaikan pengeluaran militer, Tiongkok per tahun 2021 memiliki pengeluaran untuk militer sebesar 293 miliar dollar. Kenaikan pengeluaran ini bahkan telah berlangsung secara berturut-turut selama 27 tahun lamanya. Menurut Center for Strategic & International Studies, pengeluaran

militer Tiongkok yang berlangsung membesar ini dapat menimbulkan ancaman bagi negara disekitarnya termasuk Australia. Investasi Tiongkok dalam hal militer ini telah mengubah keseimbangan militer di kawasan dengan menempatkannya menjadi unggulan sehingga akan membahayakan bagi yang lainnya. (Funaiole & Hart, 2021)

Peristiwa yang kedua yakni agresivitas Tiongkok di LTS. Pada tahun 2020, Filipina melaporkan terdapat sebuah kapal Angkatan Laut Tiongkok mengarahkan radar pengendali tembakan ke kapal Angkatan Laut Filipina di lepas Pantai Commodore Reef di Kepulauan Spratly. Kemudian Tiongkok juga membuka dua tempat penelitian baru di Fiery Cross Reef dan Subi Reef di Kepulauan Spratly, lebih dari itu fasilitas penelitian ini dilengkapi dengan silo pertahanan dan landasan pacu militer. Kemudian Tiongkok menambah kembali aktivitasnya dengan membentuk dua kota baru sekaligus dan meningkatkan aktivitasnya dengan melakukan patroli di perairan ini. Tiongkok juga kerap kali melakukan latihan militer secara masif di kawasan LTS ini sebagai bentuk penjagaan atas wilayahnya. (Council on Foreign Relations, 2020) Australia dan LTS secara geografis sangat jauh namun dengan adanya peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok bisa dijadikan suatu indikator bahwa Tiongkok betul-betul berbahaya jika bertindak agresif. Hal ini yang harus diwaspadai oleh Australia dan menjadi pertimbangan yang besar untuk Australia.

Peristiwa ketiga ini adalah pembangunan pangkalan militer di Pasifik Selatan. Pada tahun 2018 Tiongkok terdapat sebuah isu akan munculnya kerjasama Tiongkok dengan Vanuatu, sebuah negara yang terletak di Pasifik Selatan, untuk pembangunan Pangkalan Militer Tiongkok. Pangkalan militer yang berjarak tiga ribuan km dari pantai Australia memungkinkan Tiongkok untuk dapat memproyeksikan kekuatan militernya ke Samudra Pasifik sekaligus melebarkan pengaruhnya dalam hal militer di Pasifik Selatan. Namun, spekulasi mengenai pembangunan pangkalan militer di Vanuatu dibantah langsung oleh otoritas setempat. Tiongkok pun memang secara resmi belum mengajukan proposal resmi kerjasama pembangunan pangkalan militer di Vanuatu. Meskipun memang pada kenyataannya rencana pangkalan militer ini ditolak oleh Vanuatu namun bukan berarti hal ini tidak akan terjadi di masa depan. Menurut Tokoh Intelijen dan keamanan Australia, Beijing telah banyak menghujani Vanuatu dengan uang pembangunan senilai ratusan juta dolar dan di tahun 2018 memiliki komitmen untuk membangun kediaman resmi Perdana Menteri Charlot Salwai serta gedung pemerintah lainnya. (Wroe, 2018)

Perihal ancaman pangkalan militer sebetulnya sudah terjadi yakni tepat empat bulan setelah penandatanganan RAA. Australia resmi bekerjasama dengan Kepulauan Solomon yang jaraknya dengan Australia justru lebih dekat dibanding dengan Vanuatu yakni kurang dari dua ribu km. Tiongkok memiliki wewenang dalam pangkalan militer tersebut untuk kunjungan kapal, melaksanakan pengisian logistik, dan boleh untuk bersinggah dan transit di Kepulauan Solomon. (Lyons, 2022) Menurut Council of Foreign Relations, tindakan ini dapat membahayakan Australia dengan adanya pangkalan militer Tiongkok yang berada di Pasifik Selatan dengan kekuatan militer yang cukup di pangkalan militer. Ini juga menjadi pintu bagi Tiongkok dalam melebarkan jangkauan militernya ke Pasifik Selatan. (Liu, 2022) Dari ketiga peristiwa yang telah dijelaskan mengenai ancamannya bagi Australia sudah cukup menjadi bukti akan niatan agresif Tiongkok untuk Australia utamanya pada poin pembangunan pangkalan militer. Sehingga indikator dari *aggressive intention* dari Tiongkok untuk Australia sudah bisa dikatakan terpenuhi.

Dari empat indikator yang telah dijelaskan *aggregate power*, *geographical proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Tiongkok unggul jauh pada *aggregate power* dan

offensive power mengenai sumber dayanya. Adapun jauhnya geografis yang ada dalam geographical proximity bisa dilihat dari perspektif lain seperti pemusatan penduduk Australia yang berada di Pesisir Timur yang mudah diserang dan kepemilikan senjata Tiongkok yakni rudal ICBM yang dapat menjangkau Australia dari jarak yang sangat jauh. Dan terakhir tiga peristiwa dari *aggressive intention* kiranya menjadi data terakhir yang bisa menyatakan bahwa Tiongkok merupakan ancaman yang nyata bagi Australia sesuai dengan teori BoT.

Respon Australia terhadap Ancaman dan Pemilihan Jepang sebagai Sekutu

Untuk merespon ancaman dari Tiongkok, Australia melakukan balancing dengan Jepang dengan melakukan kerjasama pertahanan RAA untuk merespon ancaman dari Tiongkok. Menurut PM Australia sendiri Kerjasama RAA ini sebagai bentuk kontribusi keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik. (Al-Jazeera, 2022) Meskipun PM Australia tidak mengatakan untuk kepentingan merespon ancaman Tiongkok tapi pengamat University of Sydney, Thomas Wilkins yang berpendapat bahwa hadirnya RAA ini sebagai respon dari keamanan yang memburuk di Indo-Pasifik. Wilkins lebih jauh lagi mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ada kekhawatiran Indo-Pasifik ini tidak stabil akibat tindakan tegas Tiongkok seperti perselisihan di Laut Tiongkok Selatan dan peningkatan pelanggaran wilayah laut dan udara di Laut Tiongkok Timur. (Wilkins, 2022)

Merujuk pada teori BoT, respon balancing ini terjadi atas faktor *peace and war* yang mengatakan, suatu negara akan cenderung untuk melakukan *balancing* di saat masa damai dan pada saat awal peperangan sebagai bentuk persiapan dengan alasan negara tersebut melakukan *balancing* karena ingin menghalangi atau mengalahkan kekuatan yang merupakan ancaman besar bagi negara tersebut. Alasan Australia melakukan kerjasama dengan Jepang sebagai bentuk *balancing* ini bisa dikaitkan dan selaras dengan faktor *peace and war*. Saat ini memang belum ada peperangan antara Australia dengan Tiongkok dan bisa dikatakan sebagai masa damai lalu Australia bekerjasama dengan Jepang sebagai aliansi untuk menghalangi ancaman besar tersebut yang bisa mengakibatkan kerusakan bagi Australia yang jika tanpa *balancing* akan jauh lebih besar kerusakannya.

Pemilihan Jepang sebagai sekutu pun tampaknya merupakan langkah yang tepat bagi Australia. Jepang tercatat dalam sejarah merupakan agresor pada Perang Dunia II. Jepang pasca Perang Dunia II menerapkan kebijakan pasifisme sebagai konsekuensi dari kekalahan mereka. Kebijakan ini mengakibatkan Jepang tidak memiliki militer agresif lagi dan keamanan negaranya menjadi tanggungan Amerika Serikat. Namun pada pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015, kebijakan Jepang terkait dengan pasifisme di revisi menjadi pasifisme proaktif dengan dikeluarkannya undang-undang yang memungkinkan Jepang dapat berpartisipasi dalam pertahanan diri secara kolektif. Tindakan ini memungkinkan Jepang dapat merespon secara militer terhadap serangan apapun sesuai dengan interpretasi pemerintah Jepang yang mengkondisikan Jepang seolah-olah diserang. Hal ini merupakan perubahan yang radikal karena merubah konstitusi Jepang yang telah bertahan selama lebih dari 60 tahun. (Gustafsson dkk., 2018)

Kekuatan militer Jepang di tahun 2021, menurut Global Fire Power, menempati peringkat 5 dunia di bawah Amerika Serikat, Russia, Tiongkok, dan India. Tanggung jawab mempertahankan negara dari serangan yang datang dari luar dipegang oleh Japan Self Defense

Forces (JSDF). Dalam upaya menjaga keamanan negara, JSDF terbagi dalam tiga koridor yakni Ground Self Defense Forces (GSDF) untuk keamanan di wilayah darat, Air Self Defense Forces (ASDF) untuk keamanan di wilayah udara, dan Maritime Self Defense Forces (MSDF). Kekuatan Jepang dapat dibagi ke dalam lima bagian yakni *manpower*, *air power*, *land forces*, *naval forces*, dan *financial*. (Global Fire Power, 2022) Ke lima bagian tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Kekuatan Militer Jepang

No	Kekuatan	Penjelasan
1.	<i>Manpower</i>	Jepang memiliki 240 ribu personel baik itu dari personil aktif, personil cadangan, dan paramiliter.
2.	<i>Airpower</i>	Jepang memiliki 1,449 total aset pesawat tempur.
3.	<i>Naval Forces</i>	Jepang memiliki 155 total aset angkatan laut termasuk 21 kapal selam. Jepang merupakan salah satu negara pemilik kapal selam terbanyak.
4.	<i>Land Forces</i>	Jepang memiliki 113,001 total aset angkatan darat yang siap tempur
5.	<i>Financial</i>	Jepang memiliki anggaran sebesar 48 miliar dollar

Jepang menawarkan rasa aman bagi Australia dan menegaskan bahwa tidak ada salahnya untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Jepang. Hal ini bisa didasari oleh kekuatan militer Jepang itu sendiri yang jauh lebih baik dari Australia sehingga Jepang bisa membantu banyak dalam hal keamanan dan pertahanan baik itu di darat, air, maupun udara. Ditambah dengan sejarah Jepang yang memainkan peranan sentral pada Perang Dunia II yang berhasil membuat Amerika Serikat kewalahan. Itulah yang membuat Jepang menjadi negara yang sesuai bagi Australia dalam memperkuat keamanannya di Indo-Pasifik dan sebagai upaya *balancing* terhadap ancaman Tiongkok meskipun tidak akan imbang tapi yang ditekankan dalam teori BoT adalah upaya perimbangan kekuatan dengan menekankan pada upaya. (Schweller, 2010)

Aliansi Australia-Jepang sebagai upaya penyeimbangan ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik

RAA merupakan kerjasama pertahanan yang disepakati oleh Australia dan Jepang untuk kemudahan akses satu sama lain dalam hal militer dengan membahas persoalan hukum, kemudahan logistik, dan keamanan untuk memfasilitasi akses timbal balik. RAA pertama kali dibicarakan pada tahun 2014 dan mencapai “*in-principle agreement*” atau kondisi dimana kesepakatan akan disahkan pada tahun 2020 lalu disahkan pada tanggal 6 Januari 2022. Proses tersebut seakan dikebut untuk kepentingan kedua belah pihak yang menginginkan disegerakannya perjanjian ini. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui pertemuan virtual yang dihadiri oleh PM Jepang Fumio Kishida dan PM Australia Scott Morrison. Perjanjian ini membahas tiga poin penting yakni *status of forces* atau penempatan pasukan di masing-masing negara, latihan militer bersama, dan dukungan mengenai

kebencanaan. (Hui, 2022) Dari tiga poin tersebut penulis akan membahas dua saja yang menjadi strategi Australia untuk merespon ancaman Tiongkok yakni *status of forces* dan latihan militer bersama.

Status of forces atau penempatan pasukan di negara masing-masing adalah sebuah istilah yang digunakan untuk fenomena suatu negara dengan militernya memasuki negara lain untuk melakukan kegiatan yang bersifat kemiliteran. Dalam dunia internasional, aktivitas memasuki negara lain tentunya memiliki aturan sendiri karena ini berkenaan dengan kedaulatan dan keamanan suatu negara sehingga tidak sembarangan bisa memasuki negara tertentu dan harus mengikuti prosedur. Begitupun dengan adanya penempatan pasukan atau kunjungan daripada pasukan negara lain untuk keperluan militer atau pertahanan, hal tersebut memerlukan suatu perjanjian ataupun kesepakatan agar bisa masuk dengan mudah dan terfasilitasi dengan baik tentunya dengan komitmen dan jaminan keamanan yang disepakati masing-masing negara. (Mason, 2009) Begitulah sebuah aturan *status of forces* bekerja dengan memberikan manfaat berupa kemudahan berupa fleksibilitas dan jaminan keamanan serta ketentuan jika terjadi pelanggaran harus bersikap seperti apa. Dalam penerapan RAA, perjanjian ini akan mempermudah kedua negara jika ingin melakukan kunjungan satu sama lain karena telah dijamin oleh perjanjian ini. Adanya aturan mengenai *status of forces* ini juga akan memudahkan masing-masing negara dalam hal melakukan kegiatan militer seperti latihan militer bersama. Dan tentunya Australia maupun Jepang dapat menggunakan *status of forces* ini sebagai sebuah dasar bilamana nanti kedua negara tersebut mendapat ancaman yang menyerang sampai teritorial masing-masing, maka Australia atau Jepang dapat membantu satu sama lain dengan kemudahan akses untuk mengirimkan militer sebagai bentuk aliansi untuk melawan ancaman.

Dalam perjanjian RAA ini, Australia bermaksud untuk meningkatkan keamanannya dengan mengadakan latihan militer bersama dengan Jepang. Latihan militer bersama merupakan sebuah kegiatan militer dengan adanya penggunaan sumberdaya militer untuk pelatihan yang dipersiapkan dalam menghadapi operasi militer seperti mengeksplorasi dampak dari peperangan atau menguji beberapa strategi tanpa pertempuran yang nyata. Latihan militer bersama memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi pembangunan militer itu sendiri yakni memastikan kesiapan tempur pasukan, mengasah strategi peperangan, dan juga meningkatkan kekuatan militer itu sendiri. Dalam latihan militer bersama, idealnya akan terdapat wargame dengan mensimulasikan kondisi peperangan menggunakan skenario yang telah disiapkan sehingga dari situ bisa menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam peperangan nantinya dan harus berbuat apa. (Perla, 1987) Latihan militer bersama ini memiliki dampak jangka panjang pada peserta karena dapat menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran dalam diri pasukan akan bahayanya perang serta dapat menjalin kekompakan dan meminimalisir resiko. (Khera, 2017) Latihan militer bersama adalah salah satu cara bagaimana negara-negara mempersiapkan diri dan memperkuat pertahanannya. Biasanya negara akan bekerjasama dalam latihan militer bersama dengan negara yang memiliki kapabilitas yang lebih mumpuni dibanding negara itu sendiri seperti yang nantinya dilakukan oleh Australia dengan Jepang. Latihan militer bersama yang melibatkan dua negara atau lebih ini dapat memberikan *transfer of knowledge* dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam hal kemiliteran, analisis taktik musuh, dan unjuk kekuatan bagi negara-negara yang berpartisipasi. Dengan

adanya latihan militer bersama ini, Australia akan sangat diuntungkan karena manfaat dan fungsinya yang sangat berguna untuk persiapan jika terjadi perang. (The Economist, 2018)

Perjanjian RAA dipersiapkan untuk kemungkinan ancaman dan bahaya yang akan menimpa Australia terutama dari Tiongkok yang perlahan menunjukkan ancamannya. Menurut analisis dari Lowy Institute, Tiongkok tidak akan berani secara terang-terangan mengancam Australia atau mengancam dari jarak yang sangat dekat dari Australia untuk waktu yang dekat ini. (Shugart, 2021) Namun bukan berarti di masa yang akan datang hal ini tidak akan terjadi, bisa saja terjadi, apalagi Tiongkok telah memiliki pengaruh kuat di negara-negara Pasifik Selatan dan diperkuat dengan rencana pembangunan pangkalan militer di Pasifik Selatan. Itu tentunya menjadi alarm yang berbahaya dan harus diperhatikan, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Keputusan Australia untuk melakukan balancing dengan Jepang cukup tepat dan bisa menjadi sarana untuk memperkuat kekuatan dan hadirnya RAA menjadi sebuah jawaban sekaligus persiapan yang dilakukan oleh Australia jika memang Tiongkok betul-betul menyerang Australia dan berdasarkan analisis penulis Tiongkok sangat mampu bila menyerang Australia dengan keunggulan yang sangat telak dari pada Australia.

KESIMPULAN

Tiongkok melakukan aktivitas militer yang agresif di Indo-Pasifik seperti agresifitas militer di LTS, kenaikan anggaran militer yang pesat, dan rencana pembangunan pangkalan militer di Pasifik Selatan. Di lain hal, Australia melakukan manuver politik dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan Jepang dalam kerangka RAA. Dua fenomena tersebut diduga memiliki hubungan sebab-akibat. Agresivitas Tiongkok mengakibatkan Australia tidak boleh tinggal diam dan harus beraliansi untuk memperkuat diri. Tiongkok sendiri diasumsikan sebagai ancaman yang berbahaya bagi Australia.

Setelah dianalisis menggunakan teori BoT, Tiongkok disimpulkan sebagai ancaman karena telah memenuhi indikator empat elemen yakni *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Tiongkok unggul jauh pada *aggregate power* dan *offensive power* mengenai sumber dayanya. Adapun jauhnya geografis yang ada dalam *geographic proximity* bisa dilihat dari perspektif lain seperti pemusatan penduduk Australia yang berada di Pesisir Timur yang mudah diserang dan kepemilikan senjata Tiongkok yakni rudal ICBM yang dapat menjangkau Australia dari jarak yang sangat jauh. Dan terakhir tiga peristiwa dari *aggressive intention* yakni agresivitas militer di LTS, kenaikan anggaran militer, dan upaya pembangunan militer menjadi penentu bagaimana Tiongkok bisa diidentifikasi sebagai ancaman.

Australia merespon hal tersebut dengan melakukan balancing dibandingkan bandwagoning. Pemilihan ini didasari pada faktor *peace and war* yang menekankan pada kondisi suatu negara melakukan balancing pada saat masa damai dan persiapan perang. Bentuk dari upaya balancing Australia ini adalah kerjasama RAA. Pemilihan Jepang sebagai sekutu didasari pada kekuatan Jepang yang cukup dominan di Pasifik dan kekuatan militernya yang menempati peringkat lima dunia sehingga pemilihan Jepang bisa dikatakan keputusan yang baik untuk Australia.

Terdapat tiga poin penting dari RAA ini sebagai kesepakatan kedua belah pihak yakni *status of forces* atau penempatan pasukan di masing-masing negara, latihan militer bersama, dan dukungan mengenai kebencanaan. Namun hanya ada dua poin yang bersinggungan dengan keamanan yakni *status of forces* dan latihan militer bersama. *Status of forces* dan latihan militer bersama bisa menjadi strategi Australia untuk penguatan militer Australia yang masih kalah jauh dibandingkan Tiongkok dan menjadi upaya perimbangan untuk ancaman Tiongkok.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku dosen pembimbing 1, Mas Muhammad Faizal Alfian S.IP, M.A. selaku dosen pembimbing 2 dan Mbak Palupi Anggraheni, S.IP. M.A selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Al-Jazeera. (2022). *Australia, Japan sign 'historic' defense pact amid China concerns*. [/https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/australia-japan-sign-historic-defence-treaty-amid-chinas-rise](https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/australia-japan-sign-historic-defence-treaty-amid-chinas-rise)
- Alfian, M. F. (2020). Transisi China terhadap Ekonomi Global: Internasionalisasi dalam Perspektif Pembangunan Model China dan Dinamika Regional. *Review of International Relations*, 2(2).
- Arms Control Association. (2022). *Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance*. <https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat>
- Council on Foreign Relations. (2020). *Rising Tensions in the South China Sea*. <https://www.cfr.org/blog/rising-tensions-south-china-sea>
- Funaiolo, M. P., & Hart, B. (2021). *Understanding China's 2021 Defense Budget*. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>
- Global Fire Power. (2022). *2022 Military Strength Ranking*. globalfirepower.com. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>
- Gustafsson, K., Hagström, L., & Hanssen, U. (2018). Japan's Pacifism Is Dead. *Survival*, 60(6), 137–158. <https://doi.org/10.1080/00396338.2018.1542803>
- Haruko, W. (2020). The “ Indo-Pacific ” Concept of Geographical Adjustments and Their Implications. *S.Rajaratnam School of International Studie*, 326(326), 6–16.
- Hui, T. M. (2022). *Japan and Australia ties blossom*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/japan-and-australia-ties-blossom>
- Khera, K. K. (2017). International Military Exercise: An Indian Perspective. *Journal of Defence Studies*, 11(3), 17–40.
- Liu, Z. Z. (2022). *What the China-Solomon Islands Pact Means for the U.S. and South Pacific*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/in-brief/china-solomon-islands-security-pact-us-south-pacific>

- Lyons, K. (2022). *Solomon Islands' security pact with China raises the question – is Australia the partner for the Pacific it thinks it is?* . The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/solomon-islands-security-pact-with-china-raises-the-question-is-australia-the-partner-for-the-pacific-it-thinks-it-is>
- Mason, R. C. (2009). *Status of forces agreement (SOFA): What is it, and how has it been utilized?*
- Muraviev, A. (2021). *Could China actually attack Australia?* Australia Defence Magazine. <https://www.australiandefence.com.au/defence/budget-policy/could-china-actually-attack-australia>
- Okano, Y. (2021). *Deepening Conflict Between Australia and China: A Transition Period to A New Equilibrium Point.*
- Perla, P. P. (1987). War Games, Analyses, and Exercises. *Naval War College Review*, 40(2), 44–52. <http://www.jstor.org/stable/44636822>
- Schweller, R. (2010). Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power. *Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power.*
- Shugart, T. (2021). *Australia and the Growing Reach of China's Military.* Lowy Institute. <https://www.loyyinstitute.org/publications/australia-growing-reach-china-s-military>
- Smee, B., & McGarry, D. (2018). *“Impossible”*: China denies planning a military base in Vanuatu . The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/10/concerns-china-in-talks-with-vanuatu-about-south-pacific-military-base>
- The Economic Times. (2021). *China is struggling to establish military bases.* <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-is-struggling-to-establish-military-bases/articleshow/88268005.cms?from=mdr>
- The Economist. (2018). *Why Russia and China's joint military exercises should worry the West.* <https://www.economist.com/leaders/2018/09/06/why-russia-and-chinas-joint-military-exercises-should-worry-the-west>
- Walt, S. M. (1987). *The Origins of Alliance.* Cornell University Press.
- Wilkins, T. (2022). *Enhancing the “Special Strategic Partnership”*: Australia and Japan Sign Reciprocal Access Agreement. The Sasakawa Peace Foundation. https://www.spf.org/iina/en/articles/thomas_04.html
- Wroe, D. (2018). *China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications.* <https://www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html>